

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Khoirul Ihsan Zakariya Rizqi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Ihsankizr112@gmail.com

Abstrak

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Penelitian ini di buat atas dasar terdapatnya kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Sebagai upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintergrasi. Salah satu program ini adalah PKH. Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara semi struktur dan observasi secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Kecamatan Dukuhseti belum berhasil. Ditandai dengan belum terealisasinya semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai dengan tujuan utama PKH. Misalkan dengan banyak ditemukannya kemiskinan, gizi buruk, ibu meninggal karena melahirkan, serta rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Penanggulangan Kemiskinan

Abstract

Implementation of the Family of Hope Program (PKH) in Overcoming Poverty in Dukuhseti District, Pati Regency. This research was made on the basis of the existence of poverty in Indonesia, especially in Pati Regency, Central Java Province. As an effort to overcome poverty reduction programs. One of these programs is PKH. The purpose of this study was to analyse how PKH is implemented and the factors PKH is facing in overcoming poverty. The research method used is qualitative research with a descriptive approach, data collection techniques by means of semi-structured interviews and direct observation. The results showed

that the implementation of PKH in Dukuhseti District was not successful. Not all PKH policies are implemented appropriately. PKH's goal has not yet achieved maximum result. There is still poverty, malnutrition, mother who die from childbirth, and the low level of people who support the improvement of welfare. Suggestions that can be implemented are evaluating policies and giving awards to individuals.

Keywords: implementation of policy, Program Keluarga Harapan (PKH), poverty reduction programs

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dialami oleh sebagian besar penduduk negara berkembang. Meskipun menunjukkan angka statistik yang berbeda-beda, namun masalah kemiskinan menjadi sangat krusial jika tidak mendapatkan penanganan dengan segera. Di Indonesia sendiri, masalah kemiskinan menjadi masalah yang tidak kalah pentingnya dengan permasalahan negara yang lain. Sehingga perlu berbagai upaya dalam menanganinya agar senantiasa mampu mewujudkan sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 'kemiskinan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menjadi masalah utama dalam membahas kesejahteraan masyarakat umum.

Sehingga, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, dengan menekankan pada berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. diantaranya dengan mencetuskan Program Keluarga Harapan (PKH), PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka program tersebut di canangkan, di proses, dan di aplikasikan oleh Kementerian Sosial dan terhubung di setiap Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan sampai pada kecamatan serta desa di seluruh Indonesia.

Kebijakan pelaksanaan program tersebut diantaranya terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara pemberian bantuan sosial (bansos) yang diberikan langsung oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan atau yang seringkali disebut dengan PKH merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Demi mensukseskan program ini tentu saja, tidak serta merta sesuai dengan apa yang pemerintah harapkan. Berbagai kendala dalam kegiatan penuksesan PKH di berbagai daerah mengalami perlambatan perkembangan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidyanto yang berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto" Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, yang membahas tentang kemiskinan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Sebagai upaya mengatasi kemiskinan, salah satu program tersebut adalah PKH. Dalam hal ini tujuan PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal masih adanya kemiskinan, gizi buruk, meninggal karena melahirkan serta rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Hal tersebut mengungkapkan bahwa, adanya kurang sinkronan antara tujuan yang diambil dari pemerintah, dengan implementasi yang ada di lapangan. Sehingga, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih eksploratif terkait dengan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Guna mendapat gambaran yang detail dalam pengimplementasian tersebut, maka dapat dirumuskan bagaimakah implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di dukuh Seti, Pati?

Kajian Teori

Administrasi Publik

Administrasi public di Indonesia dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan Kasim 1993. Menurut Gordon Kasim 1993 administrasi public adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan public. Pandangan ini berada dengan pendapat Ellwein dan Hasse serta Peter knil 2001 bahwa administrasi public lebih berfungsi sebagai aplikasi hokum daripada pembuatan kebijakan dan kurang memiliki fleksibilitas dan diskresi secara komparatif ketika menerapkan provisi legal. Dalam arti luas, administrasi public menurut Henry 1989 merupakan suatu kombinasi teori praktek birokrasi publik. Sementara itu,

Hugbes 1994 menyatakan administrasi public merupakan aktivitas melayani public dan atau aktivitas pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain. Pelaksanaannya didasarkan pada prosedur dengan cara menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Administrasi publik terfokus pada proses, prosedur dan kesopanan. Tujuan administrasi public baik menurut Henry 1989 maupun Garcia dan Khator 1994 ialah untuk memajukan pemahaman tentang pemerintah dan hubungannya dengan rakyat pada gilirannya akan memajukan kebijakan public yang lebih responsif terhadap tautan sosial dan untuk menetapkan praktek manajemen yang efisien, efektif dan lebih manusiawi.

Land dan Rosenbloom Kasim 1998 menyatakan administrasi public harus dilaksanakan dengan melihat kebutuhan masyarakat. Administrasi public diharapkan dapat bekerja secara efisien dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai konsumen, sebagaimana halnya perusahaan swasta. Pendekatan ini disebut pendekatan populis yang menginginkan administrasi public agar lebih dikendalikan oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, bidang kajian utama administrasi public pada konteks negara maju menurut Garcia dan Khator 1994 meliputi aktivitas intervensi dan determinasi publik; sifat kekuasaan dan kewenangan publik; penetapan agenda dan perencanaan nasional; informasi dan hubungan public; mesin pemerintahan dan desain organisasi; hukum dan peraturan, serta diskresi administratif; pembuatan kebijakan publik; penetapan titel publik; pelaksanaan dan pemerataan program publik; perencanaan fisik dan desain tugas publik; keuangan publik; pelayanan administrasi umum; kemitraan publik; formasi model publik; infrastruktur dan pekerjaan sector publik; regulasi publik; hak milik publik; formasi modal publik; pelayanan administratif umum; kemitraan publik dan perusahaan; praktek manajemen publik; etika publik dan tindakan pegawai; partisipasi publik dan perusahaan; praktek menejemen publik; etika publik dan tindakan pegawai; partisipasi publik dan kewarganegaraan; control dan akuntabilitas publik; penelitian, pendidikan dan pelatihan administrasi publik.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak. Sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu factor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Menurut Thoha 2012 yaitu:

- 1) Kebijakan merupakan praktika social, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir dengan demikian, kebijakan merupakan suatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- 2) Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Thoha (2012) memberikan penafsira tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan public lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diperoleh dari Grindle (1980) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administrator yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995) dan Wibawa (1994) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Konsep implementasi oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabaiter, 1986). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada

kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan public direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

3. Kebijakan Kemiskinan

Kebijakan kemiskinan adalah suatu usaha pengambilan keputusan mengenai hal kemiskinan di mulai dari penentuan target dengan menggunakan indicator, penanganan, dan penanggulangan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Untuk mengatasi suatu masalah kemiskinan harus mempunyai dasar serta pemahaman yang tinggi pula, maka dari itu harus bias menggunakan cara tentang kemiskinan dan indicator yang akan di implementasikan. Kajian tentang pemahaman kemiskinan yang baik sangat diperlukan agar tidak terjadi salah urus ketika menanggulangnya. Suparlan (1984) secara singkat menjelaskan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan adalah sebuah kondisi yang selalu ada di setiap masa dan di setiap tempat. Telah banyak upaya berbagai pihak untuk mengurangi jumlah kemiskinan, dari pihak keluarga sampai dengan pihak pemerintah. Namun, semua itu bukanlah sebuah masalah yang ringan untuk diselesaikan.

Secara istilah, kata kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti tidak berharta beda atau serba kekurangan. Sedangkan kemiskinan berarti keadaan miskin. DEPDIBUD, (1990) Secara definitif, Komite Penanggulangan Kemiskinan dalam buku pedomannya menggunakan definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu ketidak mampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makan setara dengan 2100 kalori energy per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok. (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002).

Kemiskinan merupakan permasalahan utama setiap Negara yang harus diselesaikan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan., Presiden meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan.

4. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai ,Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan social ini dikenal didunia internal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bantuan social, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat.

Salah satu program bantuan sosial masyarakat dari kementerian sosial dengan bersyarat, PKH bertujuan membuka akses KPM bagi ibu hamil dan balita dalam memanfaatkan fasilitas atau layanan kesehatan dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia di dekat tempat tinggal mereka. Manfaat PKH saat ini juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Selain itu mendorong Keluarga Penerima Manfaat pelayanan sosial dasar kesehatan dan pendidikan, PKH juga memberikan fasilitas pendampingan untuk mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan ekonomi (gini ratio), serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang akan mengungkapkan gambaran yang lebih eksploratif sehingga memberikan pemahaman yang lebih akan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Guna mendapatkan data maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ini dengan cara wawancara dengan para penerima manfaat dan pengurus PKH semi terstruktur, yaitu tetap menggunakan daftar pertanyaan tetapi tidak detail. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi yang mana bertujuan untuk mengetahui implementasi program PKH yang ada di Kecamatan Dukuhseti dari luar. Dengan melibatkan partisipan primer dan sekunder. Partisipan primer di dapatkan dengan menggunakan purposive sampling, dengan mempersyaratkan antara lain: 1) asli warga dukuh seti, bukan seorang pendatang; 2) menerima bantuan PKH dari pemerintah; 3) Usia antara 30-64 tahun. Sedangkan guna mendukung yang digunakan sebagai penguat data primer, yakni dari ketua PKH lingkup kecamatan dan pemerintah kecamatan terkait. Sebelum data di lakukan analisis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka dilakukan validasi data guna mengapsahkan data agar tidak terjadi bias. Validasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan *member checking*.

Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, maka di dapatkan berbagai temuan yang dapat menggambarkan secara lebih detail terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Dukuhseti. Sebelum memaparkan berbagai temuan yang ada, maka penelitian ini melibatkan partisipan dari warga dukuh seti, yang sebelumnya telah di seleksi dengan menggunakan persyaratan tertentu, maka didapatkan 5 partisipan dengan data demografi sebagai berikut:

Table.1. Data Karakteristik Partisipan Primer

No	Partisipan	Usia (Tahun)	Pekerjaan	Pendapatan/Bulan (Rp)
1	AB	44	Buruh	1.500.000
2	MA	54	Buruh	1.000.000
3	P	39	Buruh	1.000.000
4	AL	37	Cuci Motor	1.200.000
5	S	41	Pedagang Asongan	800.000

Sumber: Data Wawancara, 2020

Berdasarkan data demografi yang digambarkan pada table. 1 dapat diungkapkan bahwa, pendapatan partisipan jauh berada di bawah rata-rata UMR (Upah Minimum Regional) jika dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah, yakni berkisar antara Rp. 1.983.000,-. Menurut ungkapan partisipan, sebelum partisipan mendapatkan bantuan program PKH, dilakukan penyisiran data. Data diambil dari penduduk yang berdomisili di Dukuhseti. Data diambil dari tiap KK (Kepala Keluarga) yang datang dari pintu kepintu oleh petugas PKH yang ditugaskan oleh pemerintah desa setempat.

Data-data yang diambil akan diperiksa dimulai dari RT yang dilanjutkan ke desa, kemudian diseleksi berdasarkan kapasitas dan kuota yang ditetapkan oleh masing-masing daerah dengan mengerahkan perangkat desa yang ada. data yang telah terseleksi dari desa, barulah di proses di kecamatan untuk masuk tahap selanjutnya.

Bentuk bantuan PKH yang digelontorkan oleh pemerintah, dapat dibedakan dalam bentuk bantuan tunai maupun non tunai. Bantuan tunai dapat diaplikasikan dalam bentuk bantuan langsung dalam bidang pendidikan, kesehatan. Misalkan dalam mengatasi kesehatan anak dan ibu hamil maupun pendidikan anak yang dimulai dari sekolah dasar sampai dengan tinggi. Sedangkan bantuan non tunai dapat diupayakan dalam bentuk kebutuhan pokok masyarakat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mayoritas masyarakat.

Sedangkan mulai tahun 2019, program PKH diperuntukkan tidak hanya pada keluarga yang memang miskin yang mempunyai pendapatan kurang dari UMR (Upah Minimum Regional), akan tetapi diperluas dalam lingkup warga yang

memang dalam kelompok lansia, maupun disabilitas. Sehingga, dalam pengaplikasiannya, PKH sendiri dibedakan menjadi 2 bantuan utama: 1) bantuan tetap; 2) bantuan utama. Yang mencakup tunjangan maksimal 4 orang dalam satu KK (Kartu Keluarga).

Jenis bantuan pada PKH yang diberikan kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Bantuan tetap untuk setiap keluarga :
 - 1) Reguler : Rp. 550.000 /keluarga/tahun.
 - 2) PKH AKSES : Rp. 1.000.000, /keluarga/tahun
- b. Bantuan Komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH
 - 1) Reguler : Rp. 2.400.000,
 - 2) Anak usia dini : Rp. 2.400.000
 - 3) SD : Rp. 900.000
 - 4) SMP : Rp. 1.500.000
 - 5) SMA : Rp. 2.000.000
 - 6) Disabilitas berat : Rp. 2.4000.000
 - 7) Lanjut usia : Rp. 2.400.000

Berbagai program yang dikembangkan dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dalam mengentaskan angka kemiskinan, yang ditemukan dalam penelitian, diantaranya:

- 1) Memprogramkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap anggota keluarga yang dikhususkan pada program Pendidikan. Dalam pengembangan dan pengelolaan program layanan ini. Hasil temuan di lapangan mengungkapkan, adanya program yang kurang terserap dengan baik dalam setiap pelayanan yang di adakan oleh pemerintah terkait dengan pemerataan PKH dalam kelompok masyarakat. Sehingga, perlu adanya pengalihan kuota agar lebih efisien dan terserap sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, sebagai bagian dari permasalahan utama yang bias dijadikan pijakan dalam pengentasan kemiskinan.

- 2) Pendataan ulang pendapatan perkapita dari kelompok masyarakat, sehingga sasaran dari penyaluran bantuan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta tepat guna.
- 3) Melakukan peremajaan data setiap 3 bulan untuk memutakhirkan data terbaru. Guna memaksimalkan tunjangan bagi keluarga miskin yang sesuai dengan data dan temuan di lapangan.
- 4) Sering melakukan diskusi dengan warga sekitar yang dengan melakukan diskusi dalam kelompok kecil yang dihadiri oleh perwakilan setiap warga, guna mengetahui efektifitas program yang telah dilakukan.

Meskipun demikian, terjadi beberapa hambatan dalam pengimplementasian program PKH di dukuhseti sendiri. Diantaranya yakni kurangnya koordinasi petugas, yang menyebabkan kurangnya pemerataan pemberian bantuan. Selain itu juga, kurangnya kedisiplinan warga dalam aspek administrasi ataupun berkas. Misalkan saja, beberapa warga kehilangan kartu tanda yang digunakan sebagai bukti ataupun alat penukaran bantuan PKH.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian pemanfaatan PKH sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di desa Dukuhseti, Pati ini dapat dikatakan sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan yang di wacanakan oleh pemerintah dalam Perpres No. 15 Tahun 2010. Pada Perpres ini mengungkapkan bahwa penanggulangan kemiskinan hendaknya dilakukan sistematis, terencana dan bersinergi melalui program pengembangan masyarakat, bantuan social maupun bantuan lain yang mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan, yang di kordinasikan melalui pemerintah provinsi, kabupaten ataupun kota (Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2010). Sehingga perlu adanya percepatan penanggulangan kemiskinan, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pati, khususnya di dukuhseti.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya beberapa hal sebagai bagian implementasi program penanggulangan kemiskinan berupa PKH telah diselenggarakan untuk kesejahteraan masyarakat yang digolongkan miskin dengan mengacu pada pendapatan perkapita. Yakni dengan membandingkan

pendapatan perkapita dengan upah minimum regional. Hal tersebut sesuai dengan berbagai hal yang diungkapkan oleh Purwanto dan Makmur (2013) mengungkapkan bahwa perlindungan social merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan kepada masyarakat salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) yang di implementasikan kepada masyarakat miskin, ibu hamil maupun pada anak yang masih dalam lingkup Pendidikan.

Selain itu, implementasi dari program PKH juga di sampaikan oleh Resnawaty dan Suleman (2017) mengungkapkan bahwa PKH merupakan bagian dari program pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan social, ekonomi maupun pendidikan yang nantinya mampu mengurangi beban masyarakat miskin baik jangka pendek maupun Panjang. Penelitian lain juga mengungkapkan hal yang senada dengan penelitian sebelumnya, yakni yang diungkapkan oleh Najidah dan Lestari (2013) menjelaskan bahwa, pelayanan kesejahteraan social melalui PKH digunakan dalam peningkatan kesejahteraan pendidikan, social maupun ekonomi yang mampu memberikan sumbangsih yang efektif dalam menanggulangi berbagai kondisi keterbatasan social maupun ekonomi dalam lingkup masyarakat.

Selain itu, dalam pengimplementasian dari program kebijakan social yang mengerucut pada PKH yang diselenggarakan pemerintah, khususnya di dukuhseti yang menysasar pada masyarakat miskin, tidak serta merta mengalami kelancaran. Akan tetapi juga mempunyai berbagai kendala yang menyertainya. Seperti halnya yang diungkapkan dalam hasil penelitian sebelumnya. Diantaranya, yang disampaikan oleh Utomo (2014) mengungkapkan bahwa pelaksanaan PKH yang dilakukan belum sepenuhnya mampu memaksimalkan pengentasan kemiskinan di desa Purwosari. Sehingga perlu beberapa evaluasi guna memaksimalkan program tersebut sehingga sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Hal senada juga disampaikan oleh Khasanah et al., (2018) mengungkapkan bahwa berbagai hal yang mampu memaksimalkan program PKH dalam masyarakat berkaitan dengan disposisi kelompok masyarakat yang berkecimpung dalam program PKH yang diselenggarakan oleh pemerintah, selain itu juga dipengaruhi oleh komunikasi serta dukungan berbagai birokrasi yang memberikan dukungan sepenuhnya dalam kelancaran pelaksanaan program PKH.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang di dukung oleh penelitian sebelumnya, maka dapat diamati bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PKH yang diselenggarakan di dukuhseti yang dituangkan pada penelitian ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari penelitian yang disampaikan dalam kajian ini yakni telah di gambarkan berbagai aspek secara detail tentang

pengimplementasian dari program PKH yang terjadi di dukuhseti. Selain itu, juga memberikan gambaran terkait dengan berbagai kondisi yang memberikan dampak ataupun hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program PKH yang ada di dalam masyarakat. Selain menggambarkan kelebihan, pada kajian penelitian ini juga mempunyai kelemahan diantaranya yakni kurang adanya data yang menunjukkan besaran PKH yang diberikan pemerintah setiap bulannya kepada masyarakat miskin secara spesifik. Hal tersebut, tentunya menjadi peluang untuk para peneliti lanjutan dengan tema yang sama, sehingga memberikan khasanah keilmuan baru untuk perkembangan keilmuan yang sama.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah di deskripsikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, pengimplementasian PKH di dukuhseti Kabupaten Pati sepenuhnya telah diselenggarakan sesuai dengan tujuan awal yang direncanakan oleh pemerintah. Akan tetapi ada beberapa kendala yang terjadi yang dikarenakan adanya keteledoran masyarakat itu sendiri maupun kurangnya komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah.

Referensi

- Khasanah, N., Sukarno, R., Yustira, O., Fitriyani, N., Pramesti, T. I., Maolana, H., & Haikal, R. (2018). Pengaruh Sumber Daya dan Disposisi Pelaksana Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 02(02), 30–35.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2013). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Purwanto, S. A., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) The Policy Implementation of Prosperous Family Program (PKH) in Giving Social Protection to The Poor Community (. *Wacana*, 16(2), 79–96.
- Resnawaty, R., & Suleman, S. A. (2017). Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial. *Prosiding Ks: Riset & Pkm*, 4(1), 1–140.
- Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pub. L. No. 15 (2010). <https://www.bphn.go.id/data/documents/10pr015.pdf>

Utomo, D. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 29-34.